

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, Nany. Analisis progresivitas pajak Bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak orang pribadi di Jakarta selatan serta hubungannya dengan ketidakmampuan membayar PBB. Skripsi Sarjana (Tidak diterbitkan). Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : Aditama.
- Damanik, Afridayani. Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada KP PBB Pratama Medan Belawan. Skripsi Sarjana (Tidak diterbitkan). Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Darwin, Modul Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, Jakarta, Th. 2008, hal.4.
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Pemrov DKI Jakarta. 2009. <http://www.jakarta.go.id> (Diakses tanggal 16 Oktober 2011).
- Manurung, Karmen. “Prospek Bagi Hasil Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Masa Mendatang (PBB, BPHTB, Pph pasal 21/OPDN)”. Modul pada Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Menjadi Pajak Daerah, Jakarta, Th. 2010.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2010). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011.
- Sasana, Hadi. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)”, *Dinamika Pembangunan* Vol. 2 No. 1. Juli 2005, hal. 19 – 29.
- Salinan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri no.213/PMK.07/2010, No. 58 tahun 2010, Pasal 1 ayat 1
- Sekundina, Kartika. 2009. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan – kepatuhan Pembayaran PBB di Kota Depok. Universitas Indonesia.
- Sitanggang, Mart Polar. 2009. Model Hubungan Kausal Kesadaran Wajib Pajak Badan, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Universitas Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hlm. 2 (diunduh Tanggal 16 Oktober 2011).

Undang-undang No.12 Tahun 1985 Pasal 4 ayat 1